

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara. Salah satu aspek terpenting dalam proses ini adalah pembangunan daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan fakta dilapangan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah dilakukan dengan menganalisis kondisi serta peluang yang ada di setiap wilayah. Adanya pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan menciptakan keadilan (Mahadiansar et al., 2020). Sistem perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dikatakan sebagai proses perencanaan dalam pembangunan yang disusun untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, antara lain keterlibatan pelaku kepentingan; terjamin kohesi, sinkronisasi; sinergitas antar daerah; terjadi keselarasan dan konsisten dari pemangku kepentingan. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional yang terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau (RPJP) adalah dokumen perencanaan guna jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, baik di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau (RPJM) digunakan dalam jangka waktu 5 tahun dari tingkat kota/kabupaten hingga nasional.
- c. Rencana Pembangunan Nasional Tahunan adalah dokumen perencanaan tahunan pada tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. (PSPPR, 2023)

Melalui penjelasan di atas, secara tersirat hakikat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang cara untuk meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pembangunan dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai upaya-upaya strategis untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan laju pertumbuhan penduduk, dan memberikan regulasi-regulasi ketat terkait pengawasan dan pengendalian masalah kependudukan. Badan Pusat Statistik Indonesia menjelaskan indikator capaian pembangunan kualitas hidup terdiri dari tiga dimensi, yaitu harapan hidup dan kesehatan; tingkat pendidikan; dan taraf kesejahteraan yang layak (BPS, 2023).

Pembangunan sumber daya manusia juga didasari pada pembentukan RPJMN Indonesia Tahun 2020-2024 yang menggagaskan visi misi melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia; melakukan peningkatan pada struktur ekonomi; membangun daya saing; dan memberikan perlindungan untuk negara. Untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pemerintah memperbaiki layanan dasar di beberapa aspek, seperti aspek kesehatan dan kesehatan. Alasannya karena beberapa wilayah di Indonesia masih mempunyai

permasalahan yang kompleks dan belum dapat teratasi dengan baik salah satunya di Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah masih mempunyai permasalahan yang menghambat pembangunan nasional, khususnya masalah pada kelompok umur remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan terdapat 10,3 juta penduduk atau setara dengan 30% dari total penduduk masih banyak yang berada dibawah umur 18 tahun. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang dapat menurunkan permasalahan ini guna dapat mencapai pembangunan nasional. Masalah ini dipicu dari kasus pernikahan usia dini di Jawa Tengah yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah bahwa terdapat kasus pernikahan dini mencapai 12.972 kasus pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 berjumlah 13.595 kasus. Data pernikahan usia dini di Jawa Tengah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Wanita berumur <16 Tahun yang Pernah Kawin di Provinsi Jawa Tengah

NO	KOTA	JUMLAH			
		2020	2021	2022	2023
	Provinsi Jawa Tengah	16,58	16,87	15,68	15,87
1.	Kabupaten Cilacap	17,60	15,81	15,77	15,79
2.	Kabupaten Banyumas	15,95	16,14	16,45	14,70
3.	Kabupaten Purbalingga	20,90	21,7	20,00	20,31
4.	Kabupaten Banjarnegara	24,14	30,55	25,87	25,93
5.	Kabupaten Kebumen	11,25	12,42	10,99	10,01
6.	Kabupaten Purworejo	10,16	11,69	9,77	11,02
7.	Kabupaten Wonosobo	29,55	30,17	24,52	30,81
8.	Kabupaten Magelang	13,68	13,78	16,90	13,94

NO	KOTA	JUMLAH			
		2020	2021	2022	2023
9.	Kabupaten Boyolali	11,05	9,29	9,94	11,40
10.	Kabupaten Sukoharjo	4,70	6,90	8,49	7,23
11.	Kabupaten Karanganyar	8,73	9,19	8,88	8,76
12.	Kabupaten Sragen	15,25	15,99	13,40	15,34
13.	Kabupaten Grobogan	25,76	27,01	22,66	22,85
14.	Kabupaten Wonogiri	15,27	14,71	15,85	14,54
15.	Kabupaten Klaten	6,57	6,69	5,99	7,85
16.	Kabupaten Blora	26,23	26,51	27,44	28,67
17.	Kabupaten Rembang	25,56	23,85	23,28	23,59
18.	Kabupaten Pati	18,97	21,25	18,48	17,42
19.	Kabupaten Kudus	9,42	11,44	8,46	8,98
20.	Kabupaten Jepara	22,38	20,23	17,17	19,92
21.	Kabupaten Demak	19,49	12,92	13,22	13,82
22.	Kabupaten Semarang	15,70	13,5	14,11	15,36
23.	Kabupaten Temanggung	15,81	19,87	18,95	17,02
24.	Kabupaten Kendal	15,42	16,46	13,88	12,29
25.	Kabupaten Batang	18,71	21,47	21,74	20,64
26.	Kabupaten Pekalongan	21,97	17,23	18,52	19,51
27.	Kabupaten Pemalang	18,58	22,77	19,54	21,49
28.	Kabupaten Tegal	16,33	21,61	15,30	17,51
29.	Kabupaten Brebes	25,36	22,76	21,72	21,17
30.	Kota Magelang	6,02	7,33	6,14	4,54
31.	Kota Surakarta	5,40	3,51	5,37	4,02
32.	Kota Salatiga	7,88	8,69	4,95	3,87
33.	Kota Semarang	7,38	6,81	6,89	6,36
34.	Kota Pekalongan	8,06	7,98	8,78	6,89
35.	Kota Tegal	12,18	13,62	9,88	8,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa, masih banyak kota/kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki angka pernikahan dini yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase rata-rata pernikahan dini di tingkat provinsi. Beberapa daerah terutama yang berada di pedesaan, menunjukkan angka yang

signifikan dan mengindikasikan adanya tantangan yang lebih besar dalam mengatasi pernikahan dini.

Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu kabupaten yang terletak di eks-Karesidenan Surakarta dan masih marak terjadi pernikahan dini. Faktanya jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten yang ada pada eks-Karesidenan Surakarta, angka pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri menempati urutan pertama sehingga dapat disimpulkan bahwa, pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri masih terbilang sangat besar. Untuk persentase data pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Persentase Penduduk Wanita berumur di bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Wanita berumur di bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta (Persen).			
	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Boyolali	11,05	9,29	9,94	11,40
Kabupaten Klaten	6,57	6,69	5,99	7,85
Kabupaten Sukoharjo	4,70	6,90	8,49	7,23
Kabupaten Wonogiri	15,27	14,71	15,85	14,54
Kabupaten Karanganyar	8,73	9,19	8,88	8,76
Kabupaten Sragen	14,07	15,99	13,40	14,34
Kota Surakarta	5,40	3,51	5,37	4,02

Sumber: BPS Jawa Tengah 2025 yang diolah kembali oleh penulis

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa Kabupaten Wonogiri menduduki posisi pertama dengan jumlah pernikahan usia dini terbanyak dari Kabupaten/Kota lain di eks-Karesidenan Surakarta. Selain itu, standar rata-rata pernikahan dini yang ada di Kabupaten Wonogiri juga melebihi batas yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu 14,54%, sedangkan standar pemerintah hanya 8.74% sehingga diperlukan strategi

untuk menurunkan kasus pernikahan usia dini ini. Sejalan dengan pernyataan (Rahma Intanningrum, 2024) bahwa pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri masih marak terjadi karena faktor budaya dan hamil di luar nikah.

Penghambat pembangunan nasional pada anak usia dibawah 17 tahun di Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan adanya permasalahan kesehatan reproduksi dan sosial remaja. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja di Kabupaten Wonogiri masuk ke dalam 10 besar kabupaten dengan kasus kekerasan seksual terhadap remaja dari total 29 kabupaten di Jawa Tengah. Wonogiri juga mencatat ada kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap remaja tertinggi di wilayah Soloraya pada tahun 2019-2021 (Ardiani & Yuliani, 2023).

Menurut Dicky Praditia (dalam Eposin 2023) Pemkab Wonogiri melaporkan sepanjang 2022 mencapai 20 kasus, angka itu menurun dibandingkan yang terlapor pada 2021 sebanyak 30 kasus. Hal tersebut tidak membuat Ketua Dinas PPKB P3A menjadi bangga, melainkan mempertanyakan bahwa kasus tersebut seperti fenomena gunung es yang artinya masih banyak kasus yang belum terlapor kepada Dinas PPKB P3A. Belum lagi masih banyak ditemukan penyelesaian kasus kekerasan seksual remaja dilakukan secara adat atau kultural. Padahal hal itu hampir sama sekali tidak menyelesaikan masalah dan tentunya merugikan korban. Misalnya penyelesaian masalah dengan menikahkan korban dengan pelaku.

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah menunjukkan hal berbeda. Hal ini dikarenakan angka kasus kekerasan seksual remaja di Wonogiri tercatat meningkat

tiga tahun berturut-turut pada 2019-2021. Berikut Tabel 1.3 yang menunjukkan kasus kekerasan seksual pada remaja di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Kasus Kekerasan Seksual Pada Remaja

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	18 kasus
2.	2020	24 kasus
3.	2021	41 kasus
4.	2022	20 kasus
5.	2023	44 kasus

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2025

Pada Tabel 1.3, menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan selama tiga tahun terhadap kekerasan seksual pada remaja. Kasus ini mencerminkan ada permasalahan yang kompleks terkait kesehatan reproduksi dan perlindungan remaja. Lonjakan kasus tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi dan hak anak; sistem perlindungan yang lemah; dan faktor sosial ekonomi.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup remaja ada di dalam bidang pendidikan yaitu angka putus sekolah atau menurunnya partisipasi sekolah. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah keterbatasan ekonomi keluarga, karena banyak orang tua yang kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, kurangnya akses terhadap konsultasi pendidikan yang memadai. Banyak orang tua dan siswa yang tidak mengetahui pentingnya pendidikan atau tidak memiliki informasi yang cukup tentang jalur pendidikan yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.4 bahwa angka partisipasi sekolah partisipasi.

Tabel 1. 4 Angka Partisipasi Sekolah

No	Tahun	Jumlah (%)
1.	2020	81,22
2.	2021	80,00
3.	2022	80,94
4.	2023	78,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.4, angka partisipasi sekolah di Kabupaten Wonogiri mengalami kondisi penurunan pada empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka partisipasi mencapai 81,22%, kemudian menurun pada tahun 2021 sebesar 80,00%. Namun mengalami kenaikan 0,94% pada 2022, tetapi kembali turun secara signifikan pada tahun 2023 sebesar 78,19%. Indikasi penurunan angka partisipasi ini memperlihatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mempertahankan keterlibatan remaja dalam pendidikan formal. Jika tidak diperhatikan maka akan berdampak pada kompetensi tenaga kerja di masa depan.

Salah satu permasalahan kenakalan remaja yang berkaitan dengan putusnya angka sekolah yaitu penyalahgunaan narkoba. Faktanya jika semakin rendah partisipasi sekolah, maka remaja cenderung lebih rentan terhadap pergaulan bebas. Tanpa adanya pendidikan yang memadai, maka akan lebih sulit untuk mendapatkan keterampilan dan pekerjaan yang layak. Peningkatan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin tinggi, maka terjadi penurunan produktivitas generasi muda yang menjadi penggerak pembangunan. Menurut Dicky Praditia (dalam Solopos, 2023) peredaran narkoba di Wonogiri semakin marak dan menargetkan kalangan remaja usia 15-20 an. Tahun 2024 terdapat delapan kasus narkoba dengan 17 tersangka. Dari jumlah tersebut, 13 orang berperan sebagai bandar dan

sisanya sebagai pengguna. Hal ini ditunjukkan dari barang bukti yang disita yakni 22, 97 gram sabu-sabu; 113, 82 ganja; dan 6.206 butir obat. Kasus serupa juga datang dari wilayah Kecamatan Ngadirojo khususnya Desa Kerjo Lor bahwa area ini menjadi markas persembunyian bagi pengedar narkoba dan target pengguna. Hal ini disebabkan banyak warga pendatang yang tidak dikenal dan merupakan buruh pekerja pabrik, sehingga kesempatan ini digunakan untuk mengedarkan narkoba dan bersembunyi dari polisi.

Melihat masalah remaja yang kompleks di Kabupaten Wonogiri, pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk mencakup hal-hal seperti jumlah, struktur, komposisi, pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, pengendalian kelahiran, dan pengarahan mobilitas penduduk, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan lain-lain. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi lembaga non kementerian dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri kesehatan. Tugas dan tanggung jawab BKKBN menjadi lembaga yang dapat diandalkan untuk menciptakan penduduk yang tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas (BKKBN, 2023a).

Berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga, dinyatakan bahwasanya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas serta pertumbuhan penduduk yang seimbang, pemerintah memiliki peran dan upaya mengendalikan kelahiran, menurunkan angka kematian,

mengarahkan mobilitas penduduk secara teratur, mengatur kehamilan, perkawinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peraturan ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan ketegasan mengenai kewenangan dalam pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota. Ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akan bertanggung jawab atas pengendalian penduduk dan keluarga. Hal ini diperjelas bahwa tujuan dari kebijakan keluarga berencana termuat dalam Pasal 21 sebagai berikut:

- a) Mengontrol kehamilan yang diinginkan,
- b) Menjaga kesehatan dan mengurangi angka kematian ibu, bayi, dan anak.
- c) Peningkatan akses kualitas informasi, pendidikan, konseling, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d) Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan laki-laki dalam praktik keluarga berencana;
- e) Menghasilkan ASI untuk menghindari kehamilan

Program KB (Keluarga Berencana) ini dibentuk oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970 sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan kependudukan di Indonesia. Program dan lembaga tersebut, selanjutnya disempurnakan melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1972, Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978, dan Keputusan

Presiden Nomor 109 Tahun 1993 yang membentuk Kementerian Kependudukan dan BKKBN.

Program Keluarga Berencana merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah yang berguna untuk mengendalikan pertumbuhan dan angka kelahiran penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat melalui program pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan angka kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Tujuan dari gerakan keluarga berencana yaitu untuk menyeimbangkan jumlah penduduk dengan daya dukung, daya tampung lingkungan, kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hanafi, 2004). Program Keluarga Berencana tidak hanya mengatur jumlah penduduk dengan menekan angka kelahiran anak dalam suatu keluarga. Namun Program Keluarga Berencana juga mengatur jarak usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk membentuk keluarga yang berkualitas.

Kampung Keluarga Berkualitas merupakan bagian dari kegiatan Keluarga Berencana yang disediakan untuk masyarakat. Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk memfasilitasi layanan secara menyeluruh terhadap Keluarga

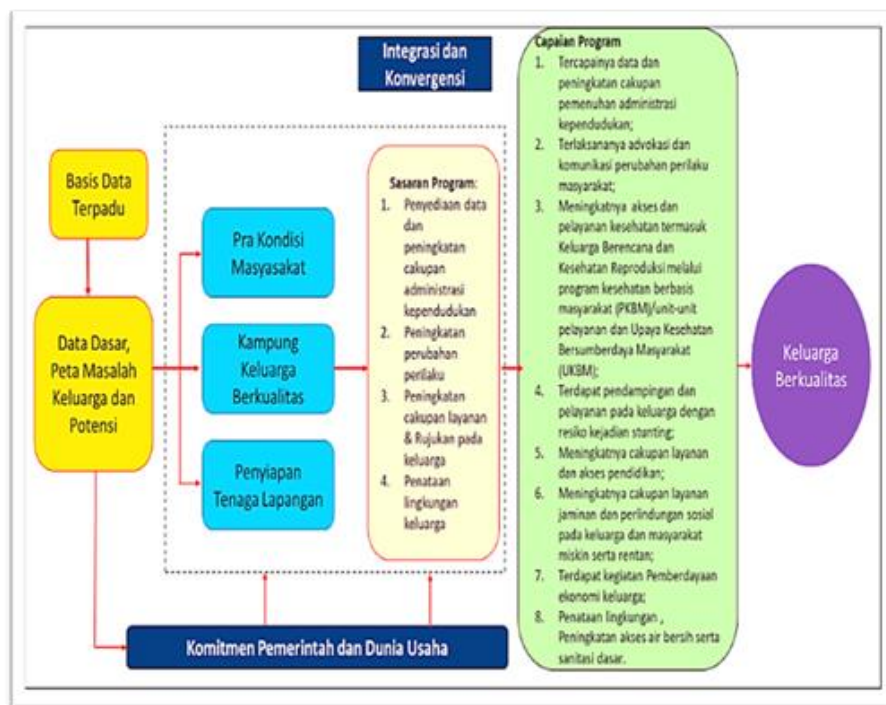
Berencana, dan memberdayakan masyarakat untuk membangun keluarga yang berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2016 oleh Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan program pembangunan prioritas Nawacita periode 2015-2019. Terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan dapat meningkatkan integritas dalam memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat (Hasriani et al., 2021). Pada saat ini program Kampung Keluarga Berkualitas terus tumbuh dengan pesat sehingga telah menghasilkan ratusan Kampung Keluarga Berkualitas.

Beberapa faktor yang mendorong terbentuknya kampung keluarga berkualitas sebagai berikut:

- a) Program keluarga berencana tidak sepopuler dulu;
- b) Peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa melalui penguatan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor yang menghasilkan keluarga kecil yang baik;
- c) Masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
- d) Melaksanakan tujuan pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Nawacita, khususnya agenda prioritas ke 3 yaitu memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta agenda prioritas ke 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

- e) Meningkatkan dan mendorong kembali program kampung keluarga berencana untuk menyongsong tujuan bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2010-2030 (Dwi Putri et al., 2019).

Program Kampung Keluarga Berkualitas telah tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung Keluarga Berkualitas secara keseluruhan telah membuat sasaran dan capaian program yang akan diberikan kepada masyarakat. Sasaran program dan capaian program dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 1. 1 Kerangka Konsep Peran Kampung Keluarga Berkualitas

Sumber: Website Kampung Keluarga Berkualitas

Dilihat pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa untuk mencapai konsep peran kampung keluarga berkualitas, maka harus melihat data dasar, peta masalah

keluarga dan potensi. Terdapat 4 sasaran program dan 8 capaian program yang diprioritaskan untuk dapat menjadi keluarga berkualitas.

Program Kampung Keluarga Berkualitas telah tersebar di Indonesia, sudah terdapat 69.945 Kampung Keluarga Berkualitas yang dicanangkan di Indonesia. Kampung Keluarga Berkualitas dan Kampung Keluarga Berencana merupakan dua konsep yang berhubungan erat, tetapi mempunyai fokus dan tujuan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari keberjalanan kedua program yaitu Program Keluarga Berencana mengacu pada inisiatif terstruktur yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk layanan kesehatan alat kontrasepsi dan pendidikan keluarga. Tujuan lainnya adalah untuk mengatur pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengelola jumlah anggota keluarga secara efektif. Sementara itu, Program Keluarga Berkualitas merupakan pengembangan konsep dari Kampung Keluarga Berencana yang lebih luas.

Program Keluarga Berkualitas tidak spesifik menekan pada aspek pengendalian kelahiran, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup keluarga melalui pemberdayaan di berbagai sektor, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Tujuan utama dari Program Kampung Keluarga Berkualitas yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencegah masalah sosial, dan membangun masyarakat yang sejahtera dan berbudaya, sehingga hal ini dilakukan melalui integrasi berbagai program pembangunan yang melibatkan banyak stakeholder (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, 2021).

Dalam pembuatan sebuah program, tujuan dan capaian program dimasukkan ke dalam kategori tersendiri. Pada capaian program yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan termasuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, maka dibuat kegiatan yang bersangkutan dengan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Program Kampung Keluarga Berkualitas juga mempunyai kegiatan yang sangat penting dalam melakukan tujuannya yaitu Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB). Berdasarkan uraian di atas, program kampung keluarga berkualitas menjadi solusi untuk permasalahan yang meningkat di beberapa desa di Wonogiri, khususnya Desa Kerjo Lor.

Desa Kerjo Lor merupakan desa yang memiliki Kampung Keluarga Berkualitas dan telah berjalan lebih dari 5 tahun. Namun dalam pelaksanaannya, Desa Kerjo Lor menghadapi tantangan besar dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang juga merupakan isu yang lebih luas di Wonogiri. Ketidakmerataan pembangunan antar desa di Kabupaten Wonogiri memperburuk kondisi sosial di Kerjo Lor, membuat masyarakatnya kesulitan untuk mengakses layanan dasar. Selain itu, masalah pengangguran dan rendahnya daya beli semakin memperburuk kesenjangan antara desa-desa di Wonogiri. Jika tidak ada upaya bersama untuk memperbaiki kebijakan dan mengedepankan pemerataan pembangunan, maka desa-desa seperti Kerjo Lor akan terus tertinggal, memengaruhi kualitas hidup warganya.

Salah satu dampak nyata dari kondisi sosial dan ekonomi yang kurang mendukung adalah masih terdapat angka pernikahan dini. Menurut (UNICEF, 2011), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan kurang dari 19 tahun. Artinya pernikahan yang terjadi pada masa remaja yang nantinya akan bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kebebasan dalam berekspresi, dan lain-lain. Kondisi ini dilatarbelakangi dengan masalah ekonomi, pendidikan, dan faktor budaya. Setiap tahun di Desa Kerjo Lor, sebanyak 5-10 anak tercatat menikah di usia dini dan ternyata juga pengaruh dari Tradisi Tunggon, dan 1-2 anak menikah karena hamil di luar nikah.

Tradisi Tunggon merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Wonogiri khususnya Desa Kerjo Lor. Tradisi ini meminta calon mempelai pria untuk menunggu calon pasangan perempuan yang akan dipinang. Tradisi ini diawali karena niat baik dari calon mempelai pria untuk menikah dengan calon pasangan perempuan dan tinggal di rumah perempuan beserta orang tua pihak perempuan. Masalah pernikahan dini yang ada di tradisi Tunggon, calon mempelai perempuan rata-rata baru lulus sekolah menengah atau putus sekolah. Hal ini juga disebabkan karena faktor keluarga dan aturan sekolah yang tidak menerima siswa yang masih dini dengan status kawin bersekolah. Berbeda halnya dengan calon mempelai laki-laki yang rata-rata memasuki usia dewasa.

Berikut Tabel 1. 5 menunjukkan angka pernikahan dini yang terjadi di Desa Kerjo Lor sebagai berikut:

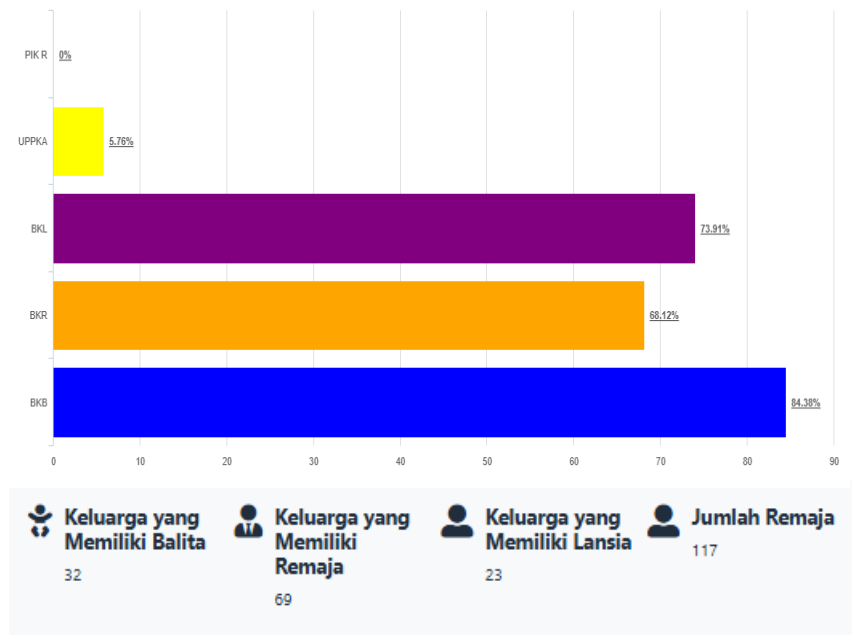
Tabel 1. 5 Angka Pernikahan Dini di Desa Kerjo Lor

No	Tahun	Jumlah	Usia
1.	2022	6	17-18
2.	2023	9	17-18
3.	2024	1	18

Sumber: Laporan Kantor Urusan Agama Ngadirojo, 2024

Dilihat dari Tabel 1.5, pernikahan dini di Desa Kerjo Lor mengalami peningkatan pada tahun 2023 berjumlah 9 orang, sedangkan pada tahun 2024 pernikahan dini di Desa Kerjo Lor mengalami penurunan yang signifikan yakni hanya 1 orang yang menikah. Memang angka pernikahan dini mengalami penurunan yang sangat signifikan, tetapi pernikahan dini masih menjadi masalah krusial kependudukan.

Masih minimnya partisipasi sumber daya manusianya, terutama program PIK Remaja dalam mengelola program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor. Partisipasi dari masyarakat menjadi penting karena dari dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan sebuah program, sehingga partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor dalam mengevaluasi program. Untuk melihat angka partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Kampung Keluarga Berkualitas Desa Kerjo Lor dapat dilihat persentase yang ada di web pada program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Persentase Partisipasi Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan

Sumber: bkkbn.go.id. kampung keluarga berkualitas sejahtera

Pada Gambar 1.2 telah dilihat bahwa persentase tertinggi partisipasi masyarakatnya terdapat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar 84,36% dari 32 keluarga yang memiliki balita. Untuk persentase kegiatan terendah berada pada program PIK Remaja hanya berada di persentase 0 % yang artinya tidak ada remaja yang mengikuti program kegiatan padahal jumlah remaja yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Kerjo Lor sebesar 117 remaja.

Mengingat masih banyak permasalahan yang terjadi di Desa Kerjo Lor tentunya memberikan dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor digunakan sebagai wadah untuk memberdayakan dan mengedukasi masyarakat melalui kelompok kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, remaja, dan lansia.

Dalam permasalahan di atas, lebih difokuskan kepada program PIK Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor. Hal ini dikarenakan tujuan pengembangan PIK Remaja yaitu untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Program PIK Remaja dapat memberikan efek dalam jangka panjang karena remaja dapat menghadapi masalah kesehatan mental, pergaulan bebas, atau tekanan sosial. Selain itu, tanpa edukasi dan bimbingan yang diberikan oleh PIK Remaja, terdapat potensi peningkatan angka pernikahan dini di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Kerjo Lor sehingga hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup remaja dan keberlanjutan pembangunan keluarga yang berkualitas.

Penelitian dari (Ramdani et al., 2023) yang berjudul “Pencegahan pernikahan usia dini melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang” menjelaskan bahwa PIK-R belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi empat faktor yaitu belum adanya pembentukan kelompok PIK-R; tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu belum mendapatkan edukasi PAP (Penundaan Anak Pertama) dari PPKB PEDES dan KUA kecamatan dan kurangnya anggaran untuk melaksanakan program PAP; dibentuknya Bina Keluarga Remaja (BKR) di Remaja (BKR) di Kecamatan Pedes belum merata dan hanya ada hanya ada dua kelompok yang mendapatkan SK Kecamatan dan tidak adanya regenerasi anggota BKR yang menyebabkan edukasi yang diberikan tidak merata kepada masyarakat lainnya; tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh dinas terkait yang yang diberikan oleh instansi terkait yang mensosialisasikan budaya menikah muda di masyarakat sehingga budaya menikah muda akan terus berkembang.

Situasi yang berbeda dijabarkan oleh (Cahaya Putri & Sama'i, 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Program PIK Remaja dan Dampaknya Bagi Remaja, Studi Deskriptif di Kampung Keluarga Berencana (KB) Desa Sukoreno Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember” telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti kesulitan untuk menyesuaikan jadwal bagi anggota PIK Remaja, hal ini disebabkan karena anggota PIK Remaja lebih sibuk dengan kegiatan mereka sendiri atau sudah mulai masuk kelas sehingga menyebabkan jadwal kegiatan di sekolah menjadi lebih padat.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan remaja di Kabupaten Wonogiri berkaitan erat dengan Desa Kerjo Lor karena juga menjadi bagian dari permasalahan di kabupaten. Permasalahan ini berkaitan dengan program PIK Remaja dan digunakan sebagai langkah awal dalam memberdayakan remaja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Wonogiri khususnya remaja di Desa Kerjo Lor sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat menganalisis **“Evaluasi Program Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Pada Kampung Keluarga Berkualitas Di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.”** Hal tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dialami remaja di Desa Kerjo Lor yang masih kerap terjadi. Evaluasi program ini menjadi salah satu bukti apakah program PIK Remaja pada kampung keluarga berkualitas sudah dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dialami remaja.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Tingginya kasus kekerasan seksual pada remaja di Kabupaten Wonogiri
2. Rendahnya angka partisipasi sekolah pada remaja di Kabupaten Wonogiri
3. Tingginya angka kenakalan remaja dalam penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Wonogiri
4. Masih adanya kasus pernikahan dini di Desa Kerjo Lor
5. Partisipasi remaja dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor masih rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengevaluasi program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
2. Menjelaskan faktor penghambat dalam evaluasi program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a) Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Evaluasi Program PIK Remaja Pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
- b) Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang Evaluasi Program PIK Remaja Pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri bagi penulis secara khusus dan bagi pembaca secara umum.

1.5.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat kepada:

- a) Bagi Peneliti

Penelitian didasarkan pada hasil dari proses pembelajaran selama perkuliahan. Selain itu, materi penelitian ini menambah wawasan dan pengalaman untuk melakukan penelitian.

b) Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi dan rekomendasi yang berguna untuk mereka yang mengambil keputusan terkait masalah program PIK Remaja pada kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor. Selain itu, tujuan dari penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab atas kinerjanya bahwa pelaksana program kebijakan bekerja dengan baik.

c) Bagi Universitas Diponegoro

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi untuk referensi dan memberikan sumbangan konseptual untuk peneliti sejenis dan civitas akademika lainnya dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adanya penelitian terdahulu dapat memudahkan dalam penulisan proposal penelitian secara sistematis dan dapat menjadi referensi. Untuk tujuan penelitian ini, sepuluh penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan, seperti yang diuraikan dalam Tabel 1.6 sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Pusat Informasi dan Konseling Remaja Program Pusat (PIK R)			
1.	Pelaksanaan PIK-Remaja (Pusat Informasi Konseling Remaja) Di	Mengetahui isu-isu TRIAD Kesehatan	Pelaksanaan PIK-Remaja berdasarkan Tahapan PIK-Remaja di SMA/SMK Se

No	Judul, Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	SMA/SMK Se Kota Pekanbaru. (Ramdani et al., 2023)	Reproduksi remaja (KRR) tiga resiko yang sering dihadapi oleh remaja yaitu seksualitas, HIV/AIDS dan NAPZA, yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang remaja.	Kota Pekanbaru mayoritas Tumbuh, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi organisasi PIK-Remaja ke seluruh siswa dan siswi disebabkan oleh Mayoritas pengurus PIK-Remaja adalah anak kelas XII sehingga tidak mempunyai waktu banyak untuk melakukan sosialisasi organisasi, siswa-siswi yang kurang peduli dengan kondisi lingkungan sekitarnya terlebih masalah PIK-Remaja, kurangnya peran siswa-siswi dalam kegiatan PIK-Remaja dan pengurus yang terlibat dalam PIK-Remaja sulit menjadwalkan waktunya untuk melakukan kegiatan tersebut
2.	Sosialisasi Program Pengorganisasian Masyarakat di Sekolah Melalui PIK-R Dalam Mencegah Pergaulan Bebas di Kalangan Siswa dan Siswi SMP Al-Azhar Medan. (Rahim Tarigan et al., 2023)	Mengevaluasi pemahaman siswa mengenai upaya pencegahan pergaulan bebas di kalangan remaja melalui implementasi program PIK-R pada siswa kelas VII Bilingual B.	Dalam rangka mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja, penyuluhan kesehatan dengan menggunakan Program Pengorganisasian Masyarakat di Sekolah Melalui PIK-R dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pengetahuan siswa.
3.	Pelaksanaan Program PIK R dan Dampaknya bagi Remaja, Studi Deskriptif di Kampung Keluarga Berencana (KB) Desa Sukoreno	Mendeskrripsikan pelaksanaan Informasi dan Konseling Remaja Program Pusat (PIK R) dan	Adanya faktor penghambat yaitu sulitnya menyesuaikan jadwal antar anggota PIK R, mulai banyaknya kesibukan para anggota PIK R dengan pekerjaan baru ataupun

No	Judul, Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. (Cahaya Putri & Sama'i, 2022)	dampaknya terhadap pemuda	anggota yang sudah naik kelas sehingga jadwal kegiatan di sekolah lebih padat lagi sehingga kegiatan rutin di dalam PIK R yaitu PS dan KS serta budidaya lele dan pemanfaatannya melalui pembuatan nugget lele juga mulai berkurang.
4.	Pencegahan pernikahan usia dini melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang. (Ramdani et al., 2023)	Melakukan pencegahan pernikahan dini melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.	PIK-R belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi empat faktor yaitu belum adanya pembentukan kelompok PIK-R; tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung yaitu belum mendapatkan edukasi PAP (Penundaan Anak Pertama) dari PPKB PEDES dan KUA kecamatan dan kurangnya anggaran untuk melaksanakan program PAP; dibentuknya Bina Keluarga Remaja (BKR) di Remaja (BKR) di Kecamatan Pedes belum merata dan hanya ada hanya ada dua kelompok yang mendapatkan SK Kecamatan dan tidak adanya regenerasi anggota BKR yang menyebabkan edukasi yang diberikan tidak merata kepada masyarakat lainnya; tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh dinas terkait yang yang diberikan oleh instansi terkait yang mensosialisasikan budaya menikah muda di

No	Judul, Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
			masyarakat sehingga budaya menikah muda akan terus berkembang.
5.	<i>Comparative Study Of Hiv/Aids Prevention Behaviors Between Students In Schools That Do Not And Have PIK-R.</i> (Nurfadila, Pratiwi dan Fitri, 2024)	Melihat perbedaan perilaku pencegahan HIV/AIDS antara siswa di sekolah yang tidak dan memiliki PIK-R.	Tidak ada signifikan perbedaan perilaku pencegahan HIV/AIDS pada siswa di sekolah dengan dan tanpa PIK-R
Keluarga Berencana			
6.	Efektivitas Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Dalam Upaya Meningkatkan Peserta KB Aktif (Studi Kasus Pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang). (Afrida et al., 2023)	Menganalisis efektivitas program Kampung KB dengan upaya meningkatkan jumlah peserta KB aktif dalam pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur di Desa Kuanheun.	Ada lima indikator pelaksanaan Program Kampung KB yaitu Pemahaman program; Tepat sasaran; Tepat waktu; Tercapainya tujuan; Perubahan Nyata.
7.	<i>Implementation Of The Kampung Family Planning Program In Percut Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang.</i> (Ariani, 2020)	Memberikan inovasi penguatan program KKBPK dengan mempersempit cakupan sasaran yaitu di tingkat daerah atau desa Deli Serdang.	Pelaksanaan Program Kampung KB belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari pelaksanaan program ini yang sudah tidak berjalan lagi dan banyak kekurangan dari berbagai indikator antara lain sumber daya, hubungan antar organisasi, dan disposisi pelaksana
Kampung Keluarga Berkualitas			

No	Judul, Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Evaluasi Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas Di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Padang Panjang. (Angellia, <i>et. all</i> , 2023)	Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Padang Panjang Tahun 2019	Program kampung Keluarga Berkualitas di Kota Padang Panjang masih memiliki kendala yaitu kurangnya SDM kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan.
9.	Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. (Nurbalqis et al., 2023)	Mengevaluasi pelaksanaan program kampung keluarga berkualitas Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.	Pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Busung masih mengalami kendala diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Busung tentang Desa Keluarga Berkualitas, kurangnya partisipasi masyarakat dan kendala dalam mengatur waktu, kurang memadai seperti tidak adanya pertemuan balai kota, belum merata ke seluruh lapisan masyarakat dan belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat.
10.	<i>Synergy Strengthening Program to Support the Success of Quality Village Programs in East Java (Study of Malang City and Tuban District)</i> . (Mardiyono <i>et al.</i> , 2024)	Mengevaluasi pelaksanaan program kampung keluarga berkualitas Di Kota Malang dan Kabupaten Tuban.	Faktor keberhasilan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas yaitu kebijakan dan komitmen serta dukungan dana dari Bupati/Walikota, kekompakan aparatur pemerintah dengan sinergi seluruh kerja yang ada unit, pemahaman dan kontribusi masing-masing OPD lintas sectoral, dan

No	Judul, Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
			adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dan terpadu untuk kelangsungan program Kampung KB.

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel 1.6 menunjukkan bahwa program PIK Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas telah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia dengan cukup baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Fokus dan lokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Studi ini menggunakan model CIPP dikarenakan memiliki tujuan untuk mengevaluasi suatu program sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan sebuah program, dan dapat memberikan rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang ada di Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor. Menurut D. L. Stufflebeam (2013) Model CIPP mengacu pada empat indikator yaitu; 1) konteks; 2) input; 3) proses; dan 4) produk. Fokus dari penelitian ini adalah program PIK Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas yang terletak di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam (Keban, 2014: 3), proses untuk mengatur organisasi dan sumber daya publik, yang berkontribusi pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Administrasi publik menurut kedua ahli tersebut, merupakan bidang seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur urusan publik dan melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Tujuan dari ilmu administrasi publik yaitu untuk menyelesaikan masalah di ranah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan organisasi, sumber daya manusia dan pendanaan. Waldo (dalam Syafie, 2006) mendefinisikan administrasi publik sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan pemerintah dengan mengelola sumber daya dan fasilitasnya. Selain itu, menurut Mccurdy (dalam Keban, 2014:3), administrasi publik sebagai proses politik untuk memerintah suatu negara dan dianggap sebagai cara utama untuk menjalankan berbagai fungsi negara.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik untuk memecahkan masalah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Terdapat perkembangan yang signifikan dibidang ilmu administrasi yang biasa dikenal dengan paradigma. Paradigma mendasari adanya perubahan dan perbedaan terhadap tujuan, teori, metodologi, dan nilai yang mendasari. Paradigma merupakan cara berpikir sekelompok orang (Syafie, 2006). Menurut Thomas S. Kuhn (dalam Syafie, 2006), paradigma sebagai cara pandang, nilai-nilai dan metode, serta prinsip dasar untuk memecahkan masalah yang dipercaya oleh sebagian masyarakat di masa tertentu.

Berdasarkan pendapat dari Nicholas Henry (dalam Keban, 2014) terdapat enam paradigma dengan periode yang berbeda yakni sebagai berikut:

a. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1990-1926). Pada paradigma pertama ini ditandai dengan adanya publikasi buku dari tokoh terkenal yaitu Frank J. Goodnow dan Leonard D. White yang berjudul *Introduction to the Study of Public Administration*. Dalam paradigma ini mereka menjelaskan bahwasanya administrasi negara harus terfokus pada birokrasi pemerintahan dan politik harus berpusat terhadap perhatian dari kemauan rakyat. Hal ini ditandai dengan adanya pemisahan dari badan legislatif yang bertugas sebagai perwakilan rakyat, badan eksekutif sebagai pelaksana suara rakyat, dan yudikatif menentukan tujuan dan perumusan kebijakan.

b. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937). Dalam paradigma ini menyatakan bahwa lokus dari administrasi negara bukan menjadi permasalahan. Hal ini dikarenakan paradigma ini hanya memfokuskan pada prinsip-prinsip administrasi yang diberlakukan secara umum pada setiap organisasi dan lingkungan budaya. Paradigma pada masa ini berfokus pada *Principles of Public Management* yang ditulis oleh W.F. Willoughby. Pengelolaan administrasi pada masa ini terdapat kontribusi dari bidang lain mulai dari industri dan manajemen. Dalam paradigma ini ditekankan prinsip yang jelas yakni administrasi negara yang dapat diterapkan disemua negara, meskipun beda visi misi, kebudayaan, dan lainnya.

c. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970). Pada masa ini administrasi negara mengalami krisis dikarenakan kembali bertemu dengan Ilmu Politik yang mengakibatkan perdebatan 36 terkait dikotomi administrasi dan politik berdasarkan kritik dari Simon. Usaha dalam memperbaiki keterkaitan konseptual antara administrasi dan politik mengakibatkan perubahan lokus yaitu birokrasi pemerintahan. Perkembangan baru administrasi negara terjadi pada masa ini dengan munculnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi yang merupakan bagian dari administrasi negara.

d. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970). Pada paradigma administrasi publik ini membahas mengenai prinsip manajemen yang dikembangkan secara ilmiah. Pada dasarnya ilmu administrasi publik ini menyajikan suatu fokus bukan lokus. Fokus yang dikembangkan meliputi perilaku organisasi, analisis manajemen, analisis terhadap sistem riset operasi dan penerapan teknologi modern. Lokus dari ilmu administrasi publik masih belum jelas dikarenakan prinsip manajemen dapat diterapkan dalam dunia bisnis.

e. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970). Pada masa ini menjelaskan mengenai dua perspektif yang harus ditingkatkan dalam administrasi negara yakni ahli administrasi negara yang terfokus pada permasalahan kebijakan publik. Administrasi negara lebih berpusat pada ilmu politik dan pengukuran hasil dari penerapan kebijakan. Fokus dari

paradigma yaitu adanya teori organisasi, kebijakan publik, manajemen dan proses administrasi. Lokusnya berada pada birokrasi pemerintahan dan problematika publik.

- f. **Governance (1990-sekarang).** Paradigma pada masa ini dikenal dengan paradigma *governance*. Munculnya konsep *governance* ini pada akhir tahun 1990, Tamagoya (Ikeanyibe, 2017) mendefinisikan *governance* sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas yang dipimpin oleh para pemimpin politik demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada masa ini proses yang dilakukan sangat sulit karena ada beberapa sektor masyarakat yang memegang kekuasaan dan memberlakukan kebijakan publik secara langsung dan mempengaruhi manusia atau sebuah instansi. *Governance* memiliki keterkaitan yang erat dengan NPM. Peters dalam (Ikeanyibe, 2017) mengatakan bahwa kedua paradigma ini memiliki kesamaan satu sama lain yakni keduanya berusaha memecahkan sistem pemerintahan hirarki dan *top down* yang ada di masa lalu. Perbedaan dari kedua paradigma terlihat bahwasanya NPM untuk penggunaan aktor non pemerintah bertujuan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi dan membatasi kekuatan negara pada melalui pendekatan *governance* sehingga ada beberapa unsur efisiensi, tetapi pembenaran utamanya adalah untuk melibatkan masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi, dan mengakui kapasitas jaringan dalam masyarakat sipil untuk menyediakan setidaknya tingkat tertentu pengelolaan diri di bidang kebijakan mereka.

Menurut Gibson, *governance* pada dasarnya melibatkan kolaborasi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang meliputi masyarakat, organisasi yang melayani, sektor publik, dan sektor swasta (Ikeanyibe, 2017). Stoker dalam (Ikeanyibe, 2017) memberikan lima proporsi kritis dan dilematis yang telah menjadi prinsip paradigma *governance*, antara lain terdapat jaringan instistusi dan aktor dari dalam dan luar pemerintahan; kabur batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi; keterlibatan dan ketergantungan kekuasaan di sebuah instansi; jaringan aktor pemerintah yang mandiri dan otonom; tidak bergantung pada kekuatan pemerintah ketika menghadapi masalah.

Dalam *governance* terdapat beberapa varian seperti *good governance*, *network governance* dan *collaborative governance*. Dalam administrasi publik, *governance* merupakan proses perumusan dan pelaksanaan tujuan publik yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan hubungan *vertical* dan *horizontal* yang lebih fleksibel dan didorong oleh nilai publik, seperti konsistensi, responsif, dan kreatif. Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan digunakan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan publik melalui praktek administrasi yang efektif sehingga tidak hanya terbatas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.6.4 Kebijakan Publik

Dalam kehidupan ini, pemerintah dan masyarakat tidak terlepas dari kebijakan publik. Hal ini dikarenakan kebijakan dapat ditemukan di setiap aspek kehidupan masyarakat, sedangkan peran pemerintah untuk merumuskan, mengontrol, dan mengatasi masalah publik di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang baik merupakan kebijakan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2013), kebijakan publik merupakan upaya untuk mengatasi masalah publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Menurut William N. Dunn (2003: 22) kebijakan publik terdiri dari berbagai pilihan yang memiliki keterkaitan yang dirancang oleh pemerintah dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawab lembaganya. Dalam kebijakan publik terdapat tahapan perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena mengikutsertakan banyak proses maupun permasalahan yang perlu dikaji. Menurut (Dunn, 2003) membagi proses kebijakan publik ke beberapa tahap yang digunakan untuk mengkaji kebijakan publik. Tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a) Tahapan penyusunan agenda merupakan tahapan strategis yang memungkinkan untuk memaknai berbagai agenda publik dan masalah yang harus dipertimbangkan.
- b) Tahapan formulasi kebijakan merupakan tahapan yang membahas solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada dan digagas oleh aktor kebijakan.

- c) Tahapan adopsi kebijakan bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses pemerintahan sehingga pada tahap ini para aktor yang terlibat harus menentukan pilihan kebijakan.
- d) Tahap implementasi kebijakan merupakan proses melaksanakan kebijakan publik yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan melibatkan banyak aktor demi mencapai tujuan bersama. Implementasi kebijakan adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu dan hasil yang diharapkan.
- e) Tahap evaluasi kebijakan merupakan tahapan kebijakan yang telah direalisasikan dan dinilai, sehingga akhir tahap ini kebijakan akan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat dapat menyelesaikan permasalahan publik.

Berdasarkan penjelasan pengertian dan tahapan kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya untuk mengatasi permasalahan publik. Pada tahapan kebijakan publik, penulisan ini akan berfokus kepada tahapan evaluasi kebijakan tepatnya evaluasi program yang telah direalisasikan.

1.6.5 Evaluasi Program

1.6.5.1 Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi dan program merupakan dua kata dengan arti yang berbeda. Evaluasi merupakan serangkaian proses. Menurut (Arifin, 2019) adalah suatu

proses yang sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk menentukan nilai atau manfaat, pertimbangan dan keputusan. Ruang lingkup evaluasi mencakup keseluruhan sistem dalam komponen dan melibatkan pemangku kepentingan, baik secara internal dan eksternal.

Scriven (dalam *Stufflebeam*, 2007), evaluasi yaitu: *evaluation is the process of determining the merit, worth, and value of things and evaluation are the products of the process*. Evaluasi didefinisikan sebagai sebuah proses untuk memberikan manfaat, harga, dan nilai dari sesuatu, serta menjadi bagian dari produk dalam sebuah proses. Menurut *Wirawan* (2011: 7) mengartikan evaluasi sebagai percobaan untuk menggali sebuah informasi yang bermanfaat terhadap sebuah objek dan mampu membandingkan dengan indikator sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Evaluasi adalah studi yang dirancang dan dilaksanakan untuk menilai dan meningkatkan manfaat program yang dievaluasi (*Ananda et al.*, 2017).

Program adalah suatu rencana kegiatan yang lebih logis, sistematis dan terencana berdasarkan pedoman tertentu hal ini dikarenakan sifat program sangat dinamis. Artinya, pelaksanaan program senantiasa berubah dan berkembang sesuai respons terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kelayakan program. Alasannya yakni evaluasi terhadap program dapat menjadi dasar apa yang harus perbaiki, dan apakah program tersebut layak diberhentikan atau dilanjutkan. Program adalah suatu bentuk implementasi kebijakan yang bersifat multi aktivitas dan berkesinambungan yang melibatkan banyak orang dalam suatu organisasi atau kelompok. Program ini terdiri dari tiga

elemen yakni keterlibatan banyak orang dalam suatu organisasi; bentuk pelaksanaan tersebut; dan terjadi dalam waktu yang singkat.

Evaluasi program merupakan suatu kegiatan penelitian yang sistematis mengenai apa yang berharga atau bermanfaat mengenai suatu objek. Menurut Denzin (2009) mengatakan bahwa evaluasi program dapat menjawab kekhawatiran para pembuat kebijakan dan penyandang dana karena biasanya melibatkan pertanyaan yang kasual mengenai program mana yang mencapai tujuan yang diinginkan. Penilaian pada setiap tahap evaluasi didasarkan pada tiga tahap indikator evaluasi kinerja yakni rendah, sedang, dan tinggi. Perihal tujuan evaluasi digunakan sebagai sumber informasi yang akurat dan objektif dalam menilai sebuah program. Informasi yang telah dikumpulkan bisa berupa proses dalam melaksanakan sebuah program, hasil yang ingin dicapai, dan manfaat yang diberikan dari adanya program tersebut. Selain itu, tujuan evaluasi digunakan sebagai landasan untuk menyusun program di masa yang akan datang.

1.6.5.2 Tujuan Evaluasi Program

Menurut Arikunto dan Jabar (2009), evaluasi program merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Hasil evaluasi program digunakan untuk membuat keputusan tentang keberhasilan program, baik yang telah dilaksanakan maupun belum. Menurut Sukmadinata yang dikutip oleh Rusdi Ananda (dalam Vitrian, 2021) tujuan evaluasi program sebagai berikut:

- a. Membantu perencanaan dan memberi masukan dalam pelaksanaan program.

Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengelola program yang dijalankan

dan memperbaharui perencanaan berdasarkan hasil tindak lanjut dari program sebelumnya

- b. Membantu dalam perubahan program. Hasil evaluasi dapat membantu pengelola program untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya dan melakukan perbaikan untuk memperbaiki program untuk mencapai keberhasilan yang ditargetkan.
- c. Menemukan informasi tentang kelebihan dan kekurangan program. Dengan menggunakan evaluasi, pengelola dapat dengan mudah menemukan solusi untuk masalah.
- d. Menentukan keberlangsungan program. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai referensi untuk keberlangsungan program dengan mempertimbangkan dan memperbarui sehingga dapat dilihat apakah program ini dapat dilanjutkan atau diberhentikan.
- e. Meningkatkan pemahaman mengenai proses psikologis, sosial, dan politik yang terlibat dalam pelaksanaan program serta komponen yang mempengaruhi program.

1.6.5.3 Indikator Evaluasi Program

Menurut D. L. Stufflebeam (2013) model yang digunakan untuk mengevaluasi program yaitu Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*). Tujuannya adalah untuk menilai dan mengembangkan manfaat program, menyediakan informasi yang bertujuan untuk memperoleh keputusan alternatif, dan mengembangkan kebijakan program. Model Evaluasi CIPP meliputi:

1. ***Context evaluation to serve planning decision.*** Evaluasi konteks berkaitan dengan penyediaan informasi supaya dapat mencapai tujuan. Informasi yang diperoleh dengan mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan program, kendala, kondisi, maupun isu yang terjadi dalam lingkungan program. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keputusan supaya dapat memperbaiki program dan membantu merumuskan “*goal and objectives*”. Selain itu, evaluasi konteks bertujuan untuk merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan apa yang akan dicapai oleh sebuah program, dan merumuskan tujuan program (Tayibnapis, 2013). Tujuan utama evaluasi konteks yaitu mengevaluasi seluruh situasi yang ada di sebuah organisasi, mengetahui dan memahami semua kelemahan yang ada, dan mencari solusi untuk mengatasi masalah di organisasi.
2. ***Input evaluation, structured decision.*** Evaluasi input merupakan kegiatan evaluasi yang berkaitan dengan identifikasi aset, permasalahan, dan peluang yang dapat membantu para pengambil keputusan untuk mendefinisikan tujuan, prioritas, rencana, maupun alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Evaluasi input menjadi sebuah evaluasi yang dapat menyediakan informasi terkait masukan yang telah terpilih, kelebihan dan kelemahan, strategi, dan desain untuk merealisasikan tujuan (Sukardi dalam Setiyaningrum, 2016). Tujuannya adalah untuk membantu para pengambil keputusan agar terhindar dari inovasi yang sia-sia atau ada kemungkinan terjadi kegagalan.
3. ***Process evaluation, to serve implementing decision.*** Evaluasi proses merupakan evaluasi yang berupaya dalam pemantauan kembali pelaksanaan

program, peninjauan kembali rencana organisasi, serta evaluasi yang telah dilakukan. Evaluasi proses berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengantisipasi rancangan prosedur atau implementasi yang akan terjadi selama tahap pelaksanaan. Selain itu, evaluasi ini juga memberikan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait program, dan berfungsi sebagai catatan atau dokumen tentang prosedur yang telah dilaksanakan (Setiyaningrum, 2016). Tujuan utama evaluasi proses menurut Mutrofin (dalam Setiyaningrum, 2016) yaitu :

- Untuk menghindari konsekuensi program yang tidak diinginkan.
- Untuk memberikan informasi yang berkelanjutan mengenai kinerja program, seperti tingkat pelaksanaan, kesesuaian dengan tujuan awal, dan isu-isu terkait bagaimana program akan diterima atau diadopsi.
- Untuk mendokumentasikan segala hal yang terjadi dalam proyeknya. Fungsi utama dari evaluasi proses yaitu untuk memberikan arahan dan masukan kepada staf organisasi supaya dapat melaksanakan programnya sesuai dengan rencana atau dapat melakukan modifikasi rencana yang ternyata hasilnya buruk.

4. ***Product evaluation, to serve recycling decision.*** Evaluasi produk merupakan evaluasi akhir dari suatu program yang berkaitan dengan identifikasi terhadap keluaran maupun manfaat dari program atau proyek, baik hasil yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Evaluasi produk bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan selanjutnya terkait dengan hasil yang telah dicapai, maupun tindakan

yang akan diambil setelah program berjalan. Evaluasi produk berfokus pada perubahan yang terjadi pada input awal (Farida Yusuf Tayibnapis dalam Setiyaningrum, 2016). Penilaian mengenai keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari individu atau kelompok yang terlibat, dan kemudian dianalisis. Dengan kata lain, evaluasi tersebut menganalisis keberhasilan atau kegagalan program dari berbagai perspektif.

1.6.6 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

PIK-Remaja merupakan wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja dengan tujuan untuk memberikan layanan berupa informasi dan konseling kesehatan reproduksi dan persiapan kehidupan berkeluarga. Tujuan diadakan program PIK Remaja sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan PIK Remaja dalam mengembangkan materi melalui program GenRe;
- Meningkatkan kemampuan inovasi dan kreativitas remaja;
- Meningkatkan minat dan bakat remaja dalam setiap kegiatan dan pengelolaan PIK Remaja (BKKBN, 2023b)

1.6.7 Faktor Penghambat Program

Di dalam menjalankan sebuah program pasti adanya faktor yang menghambat untuk pelaksanaannya, seperti sumber daya yang kurang, partisipasi masyarakatnya, dan lain sebagainya yang menyebabkan program menjadi tidak

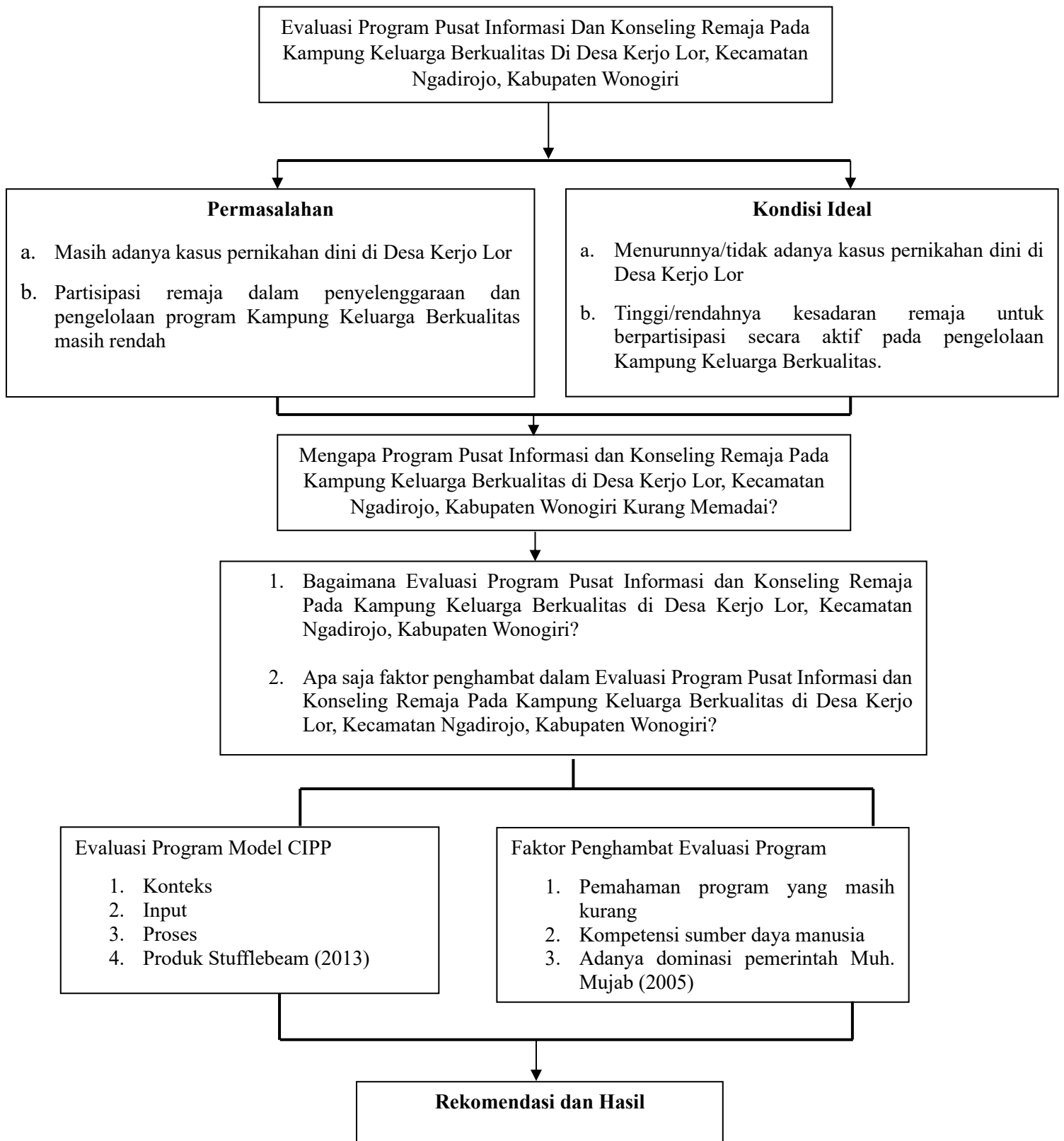
berhasil, dan harus adanya pengukuran faktor penghambat program untuk menjawab bagaimana keberhasilan sebuah program.

Berdasarkan penjelasan di atas, (Y. M. Hasanah & Jabar, 2017), menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor penghambat program yaitu rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya minat masyarakat terhadap sebuah program, dan kurangnya sosialisasi terhadap sebuah program. Menurut Notoatmodjo dalam (Mone, 2021), terdapat tiga faktor penghambat program antara lain masih rendahnya pengetahuan kader poktan; tingkat pendidikan masyarakat rendah; dan tingginya adat istiadat dan budaya

BKKBN mempunyai sebuah program yaitu Kampung Keluarga Berkualitas, menurut (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Negara, 2017) terdapat lima faktor penghambat Program Kampung Keluarga Berkualitas yaitu operasional kader Poktan belum maksimal karena tugas pokok dan kesibukan lainnya, keterlibatan *stakeholder* dalam kegiatan masih rendah, pendapatan keluarga yang masih didominasi oleh kelompok berpenghasilan rendah, petani, buruh bangunan, nelayan tradisional, partisipasi masyarakat sangat rendah, dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Menurut (Mujab, 2005) faktor penghambat evaluasi program yaitu pemahaman program masih kurang, kurangnya sumberdaya manusia yang betul-betul mengetahui program, dan adanya dominasi pemerintah dalam penentuan lokasi dan alokasi penerima program.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Evaluasi Program

Dalam menjawab rumusan permasalahan pertama, menggunakan fenomena evaluasi program. Dengan menggunakan evaluasi program, dapat mengetahui tingkat keberhasilan, baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum. Adanya pengukuran evaluasi program berdasarkan indikator evaluasi program ada empat yaitu:

- a) Evaluasi konteks adalah pengidentifikasian terkait dengan kebutuhan program, kendala, kondisi, maupun isu yang terjadi dalam lingkungan program, dalam mengukur evaluasi konteks pada sebuah program. Adanya pengukuran dimensi perencanaan awal program, yaitu kebutuhan masyarakat, kendala pemerintah, tujuan program, dan kondisi sosial ekonomi.
- b) Evaluasi input adalah pengidentifikasian aset, permasalahan, dan peluang yang dapat membantu para pengambil keputusan untuk mendefinisikan tujuan, prioritas, rencana, maupun alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Dalam mengukur evaluasi input pada sebuah program harus ada pengukuran para dimensi aspek awal dalam pelaksanaan program, yaitu sumber daya, rencana strategis, dan alternatif.
- c) Evaluasi proses adalah evaluasi yang berupaya dalam pemantauan kembali pelaksanaan program, peninjauan kembali rencana organisasi, serta evaluasi yang telah dilakukan. Dalam mengukur evaluasi proses pada sebuah

program harus ada pengukuran dimensi dalam pelaksanaan program, yaitu pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat, prioritas tujuan, dan manajemen kegiatan.

- d) Evaluasi produk hasil dari semua proses evaluasi dengan identifikasi terhadap keluaran maupun manfaat dari program atau proyek, baik hasil yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam mengukur evaluasi produk pada sebuah program harus ada pengukuran para dimensi dalam hasil dari program, yaitu dampak kepada masyarakat, manfaat yang diberikan kepada masyarakat, dan perubahan dalam masyarakat.

1.8.2 Faktor Penghambat Evaluasi Program

Dalam menjawab rumusan masalah kedua, menggunakan fenomena faktor penghambat program. Adanya pengukuran terhadap faktor-faktor evaluasi program menurut terdapat tiga indikator yaitu:

- a. Pemahaman program yang masih kurang disebabkan oleh faktor-faktor pada pihak penyelenggara maupun pada masyarakat, sehingga pemahaman yang masih kurang diukur oleh faktor pelatihan dan sumber daya manusia.
- b. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia dipengaruhi oleh kualitas individu dalam sebuah program, indikator yang mempengaruhi individu adalah pengetahuan, skill, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen.
- c. Adanya dominasi pemerintah dalam penentuan lokasi dan alokasi penerima program. Dominasi pemerintah menyebabkan sebuah alokasi program

kepada penerima program menjadi tidak terkendali, sehingga dalam mengukur faktor tersebut dengan indikator pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pelaksanaan teknis.

Tabel 1. 7 Definisi Operasionalisasi Konsep

Fokus	Gejala	Sub Gejala
Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja Pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri	Konteks	1. Kebutuhan masyarakat 2. Kendala pemerintah 3. Tujuan Program 4. Kondisi sosial ekonomi
	Input	1. Sumber daya 2. Alternatif program 3. Rencana strategis
	Proses	1. Kegiatan 2. Partisipasi masyarakat 3. Prioritas tujuan 4. Manajemen kegiatan
	Produk	1. Dampak kepada masyarakat 2. Manfaat yang diberikan 3. Perubahan yang terjadi
Faktor Penghambat Dalam Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja Pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri	Pemahaman program yang masih kurang	1. Pelatihan 2. Keterampilan
	Kompetensi sumber daya manusia	1. Pengetahuan 2. Komitmen 3. Kemampuan
	Adanya dominasi pemerintah	1. Pengambilan Keputusan 2. Pembuatan Kebijakan

Sumber: Diolah Penulis

1.9 Argumen Penelitian

Menurut Ann & Hemmer (2012), *“evaluation, as noted, is about reviewing, analyzing, and judging the importance or value of the information gathered by all these assessments”*. Evaluasi sangat penting digunakan karena digunakan untuk meninjau, menganalisis, dan menilai suatu kepentingan yang menjadi bagian nilai dari informasi yang berhasil dikumpulkan. Menurut Fitzpatrick, J.L; Sanders, J.R & Worthen (2004) mendefinisikan evaluasi sebagai proses untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai tujuan dan pelaksanaan yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa yang dibahas yaitu Kampung Keluarga Berkualitas adalah sebuah program yang dibentuk oleh BKKBN, program tersebut ditujukan untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia pada bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga agama di dalam tingkatan kelurahan, desa, atau setingkatnya. Kampung Keluarga Berkualitas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga yang berkualitas dapat berupa keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang substansial dan bercirikan sejahtera, kokoh, maju, merdeka, mempunyai anak yang sempurna, maju berpikir, dapat diandalkan, selaras, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas, penelitian ini berfokus pada program Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor,

Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Di dalamnya masih banyak terdapat permasalahan yang membuat program PIK Remaja pada kampung keluarga berkualitas menjadi terhambat yaitu tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri, tingginya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Wonogiri, rendahnya partisipasi remaja pada angka partisipasi sekolah, masih adanya pernikahan dini pada remaja di Desa Kerjo Lor dan partisipasi remaja dalam pelaksanaan PIK Remaja pada kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor masih rendah.

Melihat permasalahan-permasalahan di atas yang membahas tentang Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas, penelitian ini menggunakan teori yang mengukur bagaimana hasil sebuah program yang dijalankan organisasi yaitu dengan teori pengukuran evaluasi program menurut (D. L. Stufflebeam, 2013) yang mengatakan bahwa evaluasi program mempunyai empat indikator yaitu, evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk.

1.10 Metodologi Penelitian

1.10.1 Metode Penelitian

Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data yang disesuaikan dengan tujuan tertentu. Ada empat elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Selain itu, metode penelitian juga digunakan untuk menganalisis secara teoritis mengenai sebuah metode.

1.10.2 Tipe penelitian

Tipe penelitian merujuk pada cara-cara yang digunakan dalam melakukan penelitian dan melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan program. Oleh karena itu, penting untuk memiliki metode yang tepat dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Metode penelitian terbagi menjadi dua jenis yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2020) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah dengan dasar filsafat *postpositivisme* dan penulis berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif lebih berfokus pada pemaknaan daripada pada generalisasi.

Dalam melakukan metode penelitian adanya jenis yang digunakan untuk sebuah penelitian, jenis penelitian dapat dibagi berdasarkan karakteristik fenomena hingga kelompoknya. Terdapat dua jenis penelitian yaitu deskriptif dan eksperimental, sedangkan penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2020) penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Jenis penelitian deskriptif ini dapat melibatkan berbagai metode seperti survei, observasi, wawancara, atau studi kasus. Penelitian deskriptif tidak fokus pada hubungan sebab-akibat, melainkan lebih kepada memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai objek yang diteliti. Berdasarkan

penjelasan tersebut, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif, yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data evaluasi program pusat informasi dan konseling remaja pada program kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

1.10.3 Lokus dan Fokus Penelitian Penelitian

Lokus merupakan tempat penelitian akan dilakukan dan terdapat fenomena yang dijelaskan dalam sebuah penelitian Al Muchtar (2015). Pemilihan lokasi penelitian harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti menariknya lokasi, keunikannya, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Pemilihan Desa Kerjo Lor sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa program PIK Remaja di desa ini telah berjalan lebih dari lima tahun, namun masih menghadapi berbagai permasalahan.

Beberapa isu yang masih terjadi di antaranya adalah tingginya angka kekerasan seksual pada remaja, rendahnya angka partisipasi sekolah di kalangan remaja, penyalahgunaan narkoba, tingginya angka pernikahan dini, serta rendahnya tingkat partisipasi remaja dalam pelaksanaan program PIK Remaja. Evaluasi terhadap program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor sangat diperlukan karena kualitas kehidupan remaja di desa ini masih tergolong rendah. Meskipun pemerintah Desa Kerjo Lor telah berupaya untuk mengurangi permasalahan remaja. Namun berdasarkan data yang ada pada tahun 2024, program PIK Remaja Desa Kerjo Lor masih belum berjalan dengan optimal.

1.10.4 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2016) subjek penelitian digunakan untuk memberi batasan yang dapat berupa orang dan tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang-orang yang mempunyai peranan sebagai penyedia data informasi yang paham dengan fenomena permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan keahliannya.

Menurut Sugiyono (2020: 94) terdapat dua teknik dalam menentukan informan, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik *nonprobability sampling*, khususnya *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* dipilih karena didasarkan pada pertimbangan bahwa informan yang dipilih memiliki pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sehingga penelitian ini dapat memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai objek yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling* yang artinya teknik yang menggunakan proses berantai untuk membuat informan dapat terus berkembang sehingga dapat memperkuat data yang ada di lapangan (Sugiyono, 2020: 96). Informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini merupakan tokoh yang mengetahui informasi terkait evaluasi program PIK Remaja pada kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor, sehingga dapat diambil data dan informasi dari program tersebut.

Tabel 1. 8 Narasumber Wawancara

Instansi	Narasumber
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Wonogiri	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera
Pemerintah Desa Kerjo Lor	Kepala Desa Kerjo Lor
Kampung Keluarga Berkualitas Desa Kerjo Lor	Ketua Pelaksana Program dan anggota pengurus Program PIK Remaja
Masyarakat	3 orang remaja di Desa Kerjo Lor

Sumber: Diolah Penulis

Pada Tabel 1.8 di atas, terdapat beberapa informan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait program PIK Remaja pada kampung keluarga berkualitas. Pemilihan narasumber dari Kepala Bidang Keluarga Sejahtera di dalam Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Wonogiri, menjadi kewenangan dari bidang keluarga sejahtera. Oleh karena itu, kepala bidang menjadi peran utama untuk memberikan informasi yang cukup terkait adanya program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor.

Narasumber dari Kepala Desa Kerjo Lor ditunjuk sebagai informan utama dalam melihat permasalahan pada remaja yang ada di Desa Kerjo Lor. Ketua pelaksana kegiatan berperan untuk mengetahui jalannya kegiatan di kampung keluarga berkualitas khususnya pada program PIK Remaja. Selain itu, pemilihan narasumber dari anggota pengurus program PIK Remaja dikarenakan mempunyai peran yang strategis dalam pelaksanaan program karena terlibat secara langsung. Untuk narasumber terakhir, dua orang remaja yang mengetahui pelaksanaan program PIK Remaja dan satu remaja yang tidak mengetahui adanya program ini.

1.10.5 Jenis Data

Menurut Sujarweni (2015), data dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif secara sederhana dapat berupa kata atau kalimat yang memiliki makna tertentu, sementara data kuantitatif berbentuk angka yang dapat diukur. Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang terdiri dari berbagai teks, dokumen, foto, atau informasi yang disampaikan oleh narasumber. Data ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan program Pusat Informasi dan Konseling pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor.

1.10.6 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2020), data primer didefinisikan sebagai sumber data yang diberikan langsung kepada pengumpul data. Data ini dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat di mana objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan. Sumber data primer untuk penelitian ini meliputi Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Wonogiri, Kepala Desa Kerjo Lor, ketua pelaksana program kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor, anggota pengurus PIK Remaja, serta remaja yang ada di Desa Kerjo Lor.

Menurut Sugiyono (2020), data sekunder adalah sumber data yang tidak diberikan langsung oleh pengumpul data, melainkan diperoleh melalui perantara

seperti orang lain atau dokumen. Data sekunder biasanya didapatkan melalui data dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen informasi tentang program kampung berkualitas di Desa Kerjo Lor, kunjungan terhadap web dan berbagai media yang telah disediakan oleh pemerintah, buku, dan studi pustaka yang dapat mendukung adanya penelitian ini.

1.10.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020) teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai langkah praktis yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif”, Sugiyono menyebutkan bahwa terdapat tiga teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2020) wawancara adalah cara pengambilan data yang digunakan untuk mendeteksi masalah yang harus dikaji dan harus mendapatkan informasi lebih banyak dari narasumber secara saksama. Macam-macam teknik wawancara adalah sebagai berikut:

- Wawancara terpimpin (terstruktur) merupakan wawancara yang berkonsentrasi pada pengumpulan data-data yang relevan dengan penelitian dan sudah terdapat daftar pertanyaan yang telah ditetapkan.
- Wawancara semi terstruktur masuk kedalam golongan *in-depth interview* karena melibatkan narasumber untuk dimintai pendapat terkait permasalahan secara transparan sehingga harus mendengarkan dan

mentranskripsikan hal-hal penting yang diungkapkan oleh informan. Hal ini dapat memberikan fleksibilitas dalam memberikan informasi.

- Wawancara tidak terstruktur artinya wawancara bebas yang tidak menggunakan pedoman pertanyaan dan terdapat topik umum untuk dijadikan sebagai acuan.

Dalam penelitian ini, akan memperoleh data melalui wawancara semi terstruktur dengan beberapa pihak, diantaranya Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Kepala Desa Kerjo Lor, dan lain-lain.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2020) menyatakan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik, jika dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi ditujukan untuk memperoleh gambaran secara nyata mengenai suatu peristiwa untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, peristiwa, objek, dan kondisi. Observasi yang dilakukan, dengan cara mengamati langsung pada program pusat informasi dan konseling remaja pada kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor. Pengamatan juga dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Desa Kerjo Lor, dan Kampung Keluarga Berkualitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang mengumpulkan sejumlah dokumen dan digunakan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2020) teknik dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi penelitian ini berupa gambar, buku, data statistik, infografis, peraturan-peraturan terkait, dan dokumen resmi pemerintah atau lembaga tertentu. Penelitian ini melakukan dokumentasi dengan mengambil gambar kondisi di lapangan. Namun, ketika melakukan observasi dan wawancara menggunakan data angka terkait program pusat informasi dan konseling remaja pada kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor penelitian ini menggunakan buku, jurnal penelitian nasional, dan internasional yang mempunyai hubungan akan gejala yang ditinjau.

1.10.8 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2020) untuk mengumpulkan data informasi dapat menggunakan teknik pengumpulan triangulasi yang perolehan datanya akan diolah secara terus-menerus sehingga dapat mencapai titik jenuh. (Sugiyono, 2020) berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

- a) Untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.
- b) Tujuan dari adanya reduksi data untuk merangkum dan menafsirkan data agar data yang diperoleh dapat dipahami dan lebih jelas.
- c) Penyajian data digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan secara singkat. Biasanya digunakan untuk memperjelas data informasi yang telah diperoleh melalui bentuk tabel, grafik, dan lain-lain.

- d) Penarikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Selain itu, adanya kesimpulan ini bisa menjadi temuan yang baru dan belum pernah diteliti sebelumnya sehingga setelah adanya penelitian ini akan menjadi lebih jelas.

Analisis dan Interpretasi data merupakan langkah untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data sehingga data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil dari evaluasi program pusat informasi dan konseling pada kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor.

1.10.9 Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial (2012) keabsahan data didefinisikan sebagai kesesuaian yang didasarkan terhadap validitas dan reabilitas. Dengan pengumpulan data secara akurat akan mendapatkan ketepatan dalam keabsahan data. Salah satu cara yang biasa digunakan dalam pengumpulan data yaitu pengumpulan data triangulasi. Menurut Patton pada Afifuddin (dalam Sugiyono, 2020) terdapat empat teknik pengumpulan data untuk keakuratan keabsahan data, sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber data. Mendapatkan data kesesuaian dari informan melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, misalnya wawancara, observasi, dokumen, dan lain lain. Hal ini akan memperoleh sudut pandang yang berbeda tentang fenomena permasalahan yang ingin diteliti.

- b. Triangulasi antar peneliti. Untuk memperoleh data informasi yang dilakukan oleh beberapa orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan ini dapat memberikan wawasan baru dari informasi yang diteliti dan tidak merugikan peneliti.
- c. Triangulasi teori. Teknik pengumpulan data ini menggunakan sebuah rumusan informasi yang dapat dibandingkan dengan teori yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penelitian.
- d. Triangulasi metode. Pengumpulan data ini dilakukan dengan membandingkan informasi dan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat memperoleh kebenaran terkait informasi yang diberikan dari perbandingan pengumpulan data, dan dapat menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

. Dilihat dari keempat teknik penarikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini dikarenakan triangulasi sumber data menggunakan beragam sumber data antara lain dokumen, hasil wawancara, observasi dengan beberapa subjek dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, penggunaan triangulasi metode karena menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai perbandingan.